POLITEKNIK AGRARIA STPN

PROGRAM STUDI : PERTANAHAN

SILABUS

MATA KULIAH	KODE	BEBAN STUDI (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Tata Laksana Pengadaan Tanah Dan Pengembangan	PN506	3 SKS	VI	28/08/2025

DOSEN PENGAMPU :

DESKRIPSI MATAKULIAH

Mata kuliah ini mensimulasikan atau praktek dalam pelayanan pengadaan tanah dan pengembangan baik skala besar m,aupun skala kecil berdasarkan regulasi atau peraturan yang berlaku. Mata Kuliah ini menerapkan pembelajaran berbasis case study dengan bobot penilaian kombinasi aktivitas partisipatif 60% dan responsi 40%.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI

CPL 1
Menguasai Tata Laksana Pengadaan Tanah

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)

CPMK1
Mampu menerapkan dengan tepat dan benar tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah
CPMK2
Mampu menerapkan dengan tepat dan benar tahapan Persiapan Pengadaan Tanah
CPMK3
Mampu menerapkan dengan tepat dan benar tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
CPMK4
Mampu menerapkan dengan tepat dan benar tahapan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Sub-CPMK

Sub-CPMK1
Mampu mensimulasikan rencana kegiatan proyek pengadaan tanah
Sub-CPMK2
Mampu mensimulasikan pengumpulan data untuk penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah
Sub-CPMK3
Mampu mensimulasikan analisis data untuk penyusunan dokumen perencanaan
Sub-CPMK4
Mampu mensistematisir penyusunan dokumen perencanaan dengan baik
Sub-CPMK5
Mampu mensimulasikan kebutuhan anggaran pengadaan tanah
Sub-CPMK6

Mampu mensimulasikan persiapan pengadaan tanah
Sub-CPMK7
Mampu mensimulasikan tugas dan peran Satgas A dan Satgas B dengan baik dan benar
Sub-CPMK8
Mampu mensimulasikan peran dalam musyawarah bentuk ganti kerugian
Sub-CPMK9
Mampu mensimulasikan kegiatan pelepasan hak atas tanah dengan baik dan benar
Sub-CPMK10
Mampu mensimulasikan kegiatan pemberian ganti kerugian dengan baik dan benar serta solusi yang mungkin terjadi
Sub-CPMK11
Mampu mensimulasikan peran pelaksana pengadaan tanah dalam berperkara di peradilan
Sub-CPMK12
Mampu mensimulasikan kegiatan pemberian dan/atau penetapan hak atas tanah untuk instansi yang membutuhkan tanah

POKOK BAHASAN	
Pertemuan ke /Tanggal	**Meteri**
1-5	1. Pengumpulan data untuk penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah 2. Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah 3. Penyusunan pendanaan kegiatan pengadaan tanah baik ganti rugi maupun BOBP
6-7	1. Kerjasama dan Administrasi 2. Memvisualisasikan peran dan tugas Satgas A dan Satgas B
8	**MID TEST (UTS)**
9-12	1. Komunikasi sosial 2. Administratif 3. Beracara di peradilan
13-15	1. Pengenalan dan penyajian dokumen 2. Menyusun bagan alir kegiatan
16	**FINAL TEST (UAS)**

Referensi/Pustaka

Utama:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Di Atasnya.
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah.
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
13. Peraturan Makamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012.
15. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Perpres No. 40 Tahun 2014 Jo. Perpres No.99 Tahun 2014 Jo. Perpres No.38 Tahun 2015 Jo. Perpres No. 148 Tahun 2015
16. Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 6 Tahun 2015.
17. Surat Edaran MATR/Kepala BPN No. 1297/2.1/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 Perihal Pengelolaan Biaya Satgas A dan Satgas B Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. No. 1538/2.1-100/IV/2016 tanggal 5 April 2016 perihal Petunjuk Penyetoran ke Kas Negara Atas Penerimaan Dari Pelayanan Pengadaan Tanah
18. Surat Edaran MATR / Ka BPN No. 3061/2.1/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 perihal ketentuan pengelolaan biaya satgas A dan B dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

19. Permendagri No. 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Permenkeu No. 13/02.PMK/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Jo. No. 10/02.PMK/2015
21. Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
    Peraturan Gubernur DIY No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di DIY Jo. Peraturan Gubernur DIY No. 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur DIY No.12 Tahun 2014 (sedang disusun Perubahannya)

Pendukung:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Agaria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
7. Peraturan Menteri Agaria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
8. Peraturan Menteri Agaria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
18. Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1339/SK-HK.02/X/2022 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Secara Umum;